

# TESIS

**RELASI KUASA  
BUPATI MALANG-DPRD KAB. MALANG-PUBLIK  
DALAM PROGRAMMING RADIO  
DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)  
RADIO KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**



NAMA : ALI SACHSON MUJAHID

NIM : 071314853041

**PROGRAM MAGISTER MEDIA DAN KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**RELASI KUASA  
BUPATI MALANG-DPRD KAB. MALANG-PUBLIK  
DALAM PROGRAMMING RADIO  
DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)  
RADIO KANJURUHAN KABUPATEN MALANG**



**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Media dan Komunikasi  
pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga

Oleh :

**NAMA : ALI SACHSON MUJAHID**

**NIM : 071314853041**

**PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**Tanggal 26 Bulan Mei Tahun 2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

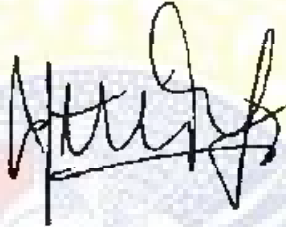
**PENULISAN TESIS INI**

**TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 2015**

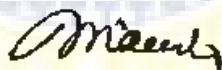
Oleh

Pembimbing Ketua



**Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comms., Ph.D**  
**NIP. 19690524 19930320 01**

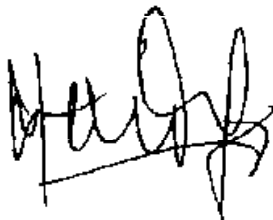
Konsultan



**Drs. Priyatmoko, M.A**  
**NIP.19560818 1981031 006**

**Mengetahui,**

**KPS S-2 Media & Komunikasi**



**Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comms., Ph.D**  
**NIP. 19690524 19930320 01**

### **Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat**

Bagian atau keseluruhan isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 26 Mei 2015







**ALI SACHSON MUJAHID,S.SOS**

**HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS**

Telah diuji pada

Tanggal **8 JUNI 2015**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

	<b>KETUA : Prof. Dr. Musta'in Mashud, Drs., M.Si</b>	
	1. Prof. Rachmah Ida, Drs., M.Comms., Ph.D	
<b>ANGGOTA :</b>	2. Dr. Djoko Wahjono Tjahjo, S.E., M.Si	
	3. Drs. Priyatmoko, MA.	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga tugas penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Namun tesis ini bukanlah titik henti dari sebuah proses pembelajaran yang akan berlangsung sampai akhir hayat.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ibu Prof. Rachmah Ida, Dra., M.Comms., Ph.D sebagai Pembimbing Ketua yang dengan penuh kesabaran di tengah kesibukan beliau untuk membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan mencabar pengetahuan sehingga penulis mengetahui sampai dimana batasan dan keterbatasannya.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Drs. Priyatmoko, M.A sebagai Konsultan yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan perspektif politik lokal dengan suasana diskusi yang selalu menimbulkan rasa ingin tahu lebih.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial hingga studi ini terselesaikan.

Terima Kasih penulis sampaikan Pemerintah Kabupaten Malang atas dukungan administrasi sehingga penulis dapat memperoleh mandat Tugas Belajar hingga selesai.

Dengan terselesaikannya tesis ini kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti proses belajar di kelas dan di lapangan.

## RINGKASAN

Penelitian ini berfokus pada relasi kuasa dalam penataan program siar pada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Fokus masalah ini dipilih karena *programming* merupakan inti dari aktivitas industri penyiaran.

Peneliti tertarik pada topik tersebut dengan beberapa alasan: (a) melekatnya identitas Radio Kanjuruhan sebagai “corong” pemerintah kendati telah berubah status hukumnya menjadi LPPL, (b) program siar mencerminkan tafsir terhadap eksistensi Radio Kanjuruhan, (c) adanya semangat untuk menciptakan program siar yang berorientasi kepada publik.

Peneliti menempatkan proses transformasi yang tercermin dalam *programming* itu sebagai upaya untuk bergerak menuju bentuk baru yang melibatkan *exercise of power* antara Bupati, DPRD Kab. Malang Publik. Sehingga diperoleh sebuah permasalahan penelitian (*research problem*): “Bagaimanakah Relasi Kuasa Bupati Malang-DPRD Kab. Malang-Publik diartikulasikan dalam praktik penataan program siar (*programming*) pada LPPL Radio Kanjuruhan?”

Dari hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memfokuskan pada keterkaitan antara loyalitas pendengar dan program siar, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam program siar, prioritas program dan dinamika regulasi penyiaran.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada radio swasta *programming* merupakan aktivitas yang bebas dari intervensi pemilik. Sebaliknya di RRI Surabaya, *programming* merupakan aktivitas yang tersentralisir atau diatur oleh RRI Pusat Jakarta. Pada radio swasta bersegmen remaja, audiens memegang peran penting

dalam menentukan materi apa yang dimasukkan dalam program siar. Mulai dari lagu yang diputar sampai jenis iklan apa yang disiarkan. Berbeda dengan RRI yang telah memiliki "pakem" berupa petunjuk teknis dalam *programming* yang telah menetapkan program siar baku terdiri dari: *news*, pendidikan, kebudayaan, hiburan, acara penunjang dan iklan.

Penelitian mengenai dinamika regulasi penyiaran menunjukkan bahwa peran negara yang ditetapkan perundangan semakin berkurang pada era Reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru. Peran negara dalam pengawasan digantikan oleh publik melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Penelitian ini menggunakan kerangka teori tentang *discourse*, *power* dan *knowledge* yang digagas oleh Michel Foucault. *Discourse* dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik-praktik yang memberikan alasan logis bagi *statements*. Praktik-praktik ini lalu dan menjadi aturan tak tertulis bagi struktur-struktur yang memproduksi ujaran-ujaran dan *statements*. Sedangkan produksi *statements* tersebut mengikuti formasi diskursif yang membagi apa saja yang dapat dikatakan secara jelas dalam sebuah *discourse*.

*Statements* tersebut diproduksi dengan dukungan struktur diskursif. Struktur diskursif ini kemudian menentukan cara pandang terhadap objek. Artinya *discourse* menyebabkan menyempitnya area pandang seseorang-sehingga tidak memungkinkannya untuk melihat fenomena yang lebih luas, atau setidaknya fenomena yang dianggap nyata atau layak untuk diperhatikan atau sekedar memperhatikan keberadaan.

Pembentukan *discourse* yang ditopang struktur diskursif ini meliputi 3 tahapan. Pertama, pembatasan perspektif yang *legitimate* bagi orang sebagai *agent of knowledge* dan merupakan norma untuk melakukan penelaahan konsep dan teori-



teori (*delimitation of a field of objects*). Kedua untuk agar *discourse* teraktifkan, hadir dalam eksistensinya, orang (*the knower*) harus membangun hak untuk berbicara atau dengan kata lain pada tahap kedua adalah masuk ke area diskursif seseorang harus membangun otoritas dan legitimasi agar dapat berbicara. Ketiga, setiap tindakan menghasilkan sebuah peta kemungkinan terciptanya *statement*, setiap *statement* menunjuk kepada yang lain. Dalam arti, tindakan diskursif tersebut harus melekat pada *statement* sehingga di masa mendatang *statement-statement* lainnya dapat dibuat.

Konsep-konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep publik dan demokratisasi penyiaran. Konsep-konsep tersebut dipergunakan dalam analisis agar selaras dengan konteks yang sedang dibahas.

Keterkaitan antara kerangka teoritik dengan paradigma penelitian konstruktivis yang dipilih oleh peneliti terletak pada asumsi-asumsi Foucault mengenai objek dan subjek dalam pembentukan kesadaran dan tindakan dalam suatu interaksi sosial (struktur)

Informan penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang *key informant* dan 10 (sepuluh) *secondary informant*. *Key informant* dipilih karena mengetahui secara jelas proses awal pembentukan Radio Kanjuruhan menjadi LPPL. Sedangkan *secondary informant* dipilih berdasarkan kemampuan menjawab terhadap pertanyaan penelitian dan pengalaman atau keterlibatannya dalam proses programming.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Dokumen Pemerintah Kabupaten Malang, peraturan perundangan bidang penyiaran, perundangan bidang pemerintahan dan catatan-catatan lainnya yang dimiliki oleh Radio Kanjuruhan. Observasi secara resmi (berdasarkan surat ijin penelitian)

dilakukan mulai Februari-Maret 2015. Namun secara informal peneliti telah mengobservasi sejak Desember tahun 2014. Di samping itu peneliti pernah terlibat langsung dalam aktivitas penyiaran pada kurun 2010-2011.

Kerangka analisa yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah kerangka analisa penelitian arkeologis yang menyajikan detail analisa pada level: *rule of discursive formation*, *rule of discourse correlation*, *rules of discursive transformation* dan *the archive*.

Kesimpulan atau gambaran yang didapatkan dari penelitian ini adalah: (a) proses *programming* tidak melibatkan publik. *Programming* tersebut dimonopoli oleh pemerintah melalui aparat birokrasi. Dari sudut pandang demokratisasi penyiaran, terdapat paradoks bahwa konsep penyiaran berbasis publik yang telah disepakati tersebut pada tataran praktiknya malah menihilkan arti demokrasi seperti absennya partisipasi publik dalam penyiaran. Secara subtil, *programming* yang dimonopoli oleh birokrasi ini menciptakan resistensi di tingkatan bawah (*grassroot*) dengan menggunakan Radio Komunitas, (b) relasi kuasa Bupati-DPRD Kab.Malang-Publik menghasilkan sebuah diskursus penyiaran publik lokal yang dominatif. Hal ini tercermin dari pengetahuan yang diciptakan dan disebarakan melalui *programming* LPPL Radio Kanjuruhan. *Programming* tersebut mengikuti sebuah aturan diskursif untuk "menjaga citra positif Pemerintah Kabupaten Malang yang kondusif dan aman bagi investor". Sehingga upaya-upaya internal untuk melakukan transformasi secara penuh menjadi radio berorientasi publik sejak ditetapkannya Radio Kanjuruhan ini sebagai LPPL pada tahun 2013 dipandang sebagai aktivitas yang tidak dapat diterima.

Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk memperluas dan mendalami proses transformasi yang terjadi sehingga dapat diketahui lebih jelas dinamika penyiaran publik lokal yang tengah terjadi.

